



UMMU PRESS



Muhlis Hafel (editor)

# **KEKUATAN-KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA**

---

**PENGANTAR**

DR. Valina Singka Subekti, M.Si

(Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik UI)

---

Dansel Hutagalung-A. Bakr Ihsan-Titin Purwaningsih-Nur Hasanah, AS-E. Winarto-  
Andi Tendri Sompal-Toto Priadi-Indra Jaya-Payakhun Andriadi-Jerry Sambuaga-  
Muslim Mufti-Romanus Ndau-Muhlis Hafel-Fadjar Irtani Sophaan-Joko Putro  
Purnomo-Neneng Yani Yuningsih-Zulfikar Gazali-Andisi Yudiarsa-Ma'mum Murod  
Al-Barbasy-Taufikulha di-Andi Zastrawati

# **KEKUATAN – KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA**

**Muhlis Hafel [ Ed]**

## **PENGANTAR :**

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si  
(Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia)

## **SAMBUTAN**

Kasman Hi. Ahmad, S.Ag, M.Pd  
(Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara)

Penerbit  
UMMU Press  
2011

## **KEKUATAN – KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA**

**Muhlis Hafel (Ed)**

Pengantar :

**Dr. Valina Singka Subekti. M.Si**

Sambutan :

**Kasman Hi. Ahmad**

(Rektor UMMU)

UMP 0004211

Gambar Cover :

[www.thegodmurders.com](http://www.thegodmurders.com)

Penerbit

**UMMU Press**

KH. Ahmad Dahlan, No. 100, Gedung B, Lt. II

Sasa-Ternate Selatan – 97712

Telp/Fax (0921) 3123979

Email : [ummu\\_press@ymail.com](mailto:ummu_press@ymail.com)

**Cetakan I, Maret 2011**

Bekerjasama dengan FISIP

**Universitas Muhammadiyah Maluku Utara**

Desain Cover

**HerØes & Gus Im**

Layout & Montase

**Axin & Tim Kreatif**

**ISBN : 978-602-98717-1-5**

Percetakan :

**Semarak Tata Warna, Jakarta**

Isi diluar tanggungjawab percetakan

All Rights Reserved

## KATA PENGANTAR

Buku yang sekarang berada di tangan pembaca semula adalah makalah wajib mahasiswa program doktor pada Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia pada mata kuliah Pembangunan Politik: Kekuatan-kekuatan Politik Indonesia. Makalah tersebut dipresentasikan di dalam kelas dan memperoleh umpan balik dari pengajar maupun para mahasiswa yang kemudian diperbaiki untuk disempurnakan. Saudara Muhlis Hafel, salah satu dari mahasiswa tersebut kemudian berinisiatif menerbitkannya dalam bentuk buku yang diberi judul 'Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia'.

Saya meyambut baik penerbitan buku ini sebagai upaya untuk terus menerus mendiseminasikan pemikiran dan wacana mengenai peran yang diharapkan dari kekuatan-kekuatan politik Indonesia dalam konteks pembangunan politik. Mahasiswa program doktor ilmu politik sebagai bagian dari kelompok menengah intelektual Indonesia tentu saja mempunyai tanggung jawab untuk memberi konten terhadap pembangunan politik Indonesia yang masih terus berproses mencari bentuk yang ideal di era demokratisasi ini.

Salah satu tantangan utama demokratisasi adalah kemampuan kita untuk membangun sistem politik yang demokratis sesuai kebutuhan bangsa Indonesia. Sistem politik yang demokratis ini dibentuk supaya mempunyai kemampuan bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Pengalaman berdemokrasi Indonesia sejak Era Parlementer, Era Terpimpin, Era Orde Baru dan Era Reformasi memperlihatkan bahwa sistem politik yang demokratis dapat menjadi rumah besar yang dinamis bagi setiap kekuatan politik untuk bergerak dan berinteraksi satu sama lain dengan visi sama yaitu menciptakan kehidupan politik yang dapat mendorong percepatan perbaikan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia.

Dalam hal ini menjadi penting untuk memastikan agar setiap struktur politik dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing seperti disebutkan oleh Gabriel Almond sebagai 'struktural fungsional'. Tentu saja struktur dan fungsi itu bekerja karena digerakkan oleh para aktor politik. Oleh karena itu membangun sistem politik yang demokratis tidak cukup hanya membangun aspek struktur politiknya saja, tetapi juga kultur politik agar struktur politik dalam hal ini lembaga-lembaga politik dapat bekerja secara demokratis.

Buku yang disunting oleh Muhlis Hafel ini berusaha menggambarkan enam kekuatan politik utama seperti partai politik, birokrasi, militer, kelompok buruh, masyarakat sipil serta Islam yang secara dinamis berkontribusi sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini.

Harapan saya semoga buku ini dapat memberi kontribusi untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa dalam memahami dinamika politik Indonesia yang masih terus bergerak mencari bentuk terbaiknya.

Jakarta, 22 Maret 2011

**Dr Valina Singka Subekti MSi**  
[Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas  
Indonesia]

## **Sambutan Rektor**

### **Universitas Muhammadiyah Maluku Utara**

#### **Bismillahirrahmanirrahim**

**KITA** tentu masih ingat, Ferdinand Marcos yang bertengger di puncak pimpinan negara Philipina selama 21 tahun dari 30 Desember 1965 hingga 25 Februari 1986. Di bulan Mei 1998, gelombang besar aksi mahasiswa di Indonesia menggetarkan dinding bangsa dan dunia akhirnya memaksakan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun harus turun dari takhta kekuasaannya. Lalu, 14 Januari 2011, Presiden Zine El-Abidine Ben Ali yang telah berkuasa 23 tahun di Tunisia harus tumbang setelah melarikan diri ke Arab Saudi, dan pada 18 Pebruari 2011, Presiden Housni Mubarak, yang telah menggenggam kekuasaan selama 30 tahun di Mesir, dirobuhkan rakyatnya dengan dibantu militer. Empat contoh pemimpin yang ditumbangkan oleh rakyatnya melalui *people power*, menunjukkan bahwa di tengah rakyat, terdapat kekuatan-kekuatan politik raksasa yang tidak bisa dipandang dengan sebelah mata.

Kehadiran buku *Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia*, yang ditulis oleh Sdr. Muhlis Hafel, dosen Ilmu Politik FISIP UMMU yang sementara menempuh studi doktoralnya (S3) pada Program Ilmu Politik FISIP UI bersama kawan-kawannya sekaligus menyuntingnya, memberi kita pengayaan bahan-bahan yang berkaitan dengan realitas politik yang ada. Bahwa di tengah masyarakat, partai politik bukanlah satu-satunya kekuatan politik yang harus menjadi sandaran. Padahal, sebagaimana diuraikan dalam buku ini, beberapa kekuatan politik, selain partai politik, masih ada birokrasi, militer, buruh, civil society, dan Islam. Seluruh kekuatan-kekuatan politik ini merupakan pilar penting bagi tegaknya demokrasi bagi Indonesia.

Kita mengalami pasang surut politik yang begitu mempengaruhi dinamika demokrasi di negeri ini. Pasang surut itu berupa patahan-patahan sejarah yang diskontinuitas. Kita pernah mengalami pemberontakan-pemberontakan yang tumbuh di daerah-daerah pada era awal menjelang kemerdekaan, yang akhirnya dapat ditumpas oleh rakyat bersama angkatan bersenjata kita. Kita juga pernah dihadapkan pada sejarah bagaimana Pemilihan Umum pada tahun 1950-an yang diikuti begitu banyak Partai Politik, lalu akhirnya melahirkan politik tarik-menarik antar elit yang tidak berkesudahan. Kejadian ini, lalu berulang pada era awal reformasi, pasca tumbanganya Soeharto. Begitu banyak partai politik menghiasi pelataran politik negeri ini, hingga kini.

Kita semestinya bersyukur, bahwa seluruh kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia dapat tumbuh dan saling menguatkan. Memang buku ini belum sempat menguraikan peran media massa sebagai salah satu kekuatan yang cukup berpengaruh dalam menumbuhkan demokratisasi di tengah masyarakat. Tapi paling tidak, dengan kekuatan-kekuatan politik yang diuraikan dalam buku ini memberi kita gambaran, bahwa negeri ini

memiliki modal sosial (*social capital*) yang demikian besar, dalam merawat kekuatan-kekuatan politik yang ada.

Sekali lagi, buku ini dapat menjadi referensi penting bagi pengayaan pemahaman, pengetahuan dan bahkan proyeksi kita dalam menyusun dan menguatkan “batu-bata” demokrasi dari seluruh potensi yang ada di tengah masyarakat. Buku ini juga sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen yang menggeluti bidang Ilmu Politik, atau mereka yang peduli pada perkembangan demokrasi di Indonesia.

Semoga buku ini memberikan manfaat.

*Nasrun Minallah Wafathun Qharieb*

Jakarta, 01 Maret 2011

Rektor,

**Kasman Hi. Ahmad**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Buku yang berjudul, “ Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia” ini merupakan kumpulan makalah wajib, yang disajikan dalam diskusi kelas mata kuliah Pembangunan Politik : Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia, Program Doktor, pada Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Atas pertimbangan kurangnya buku bacaan tentang kekuatan-kekutan politik, maka saya berinisiatif menyunting dalam bentuk sebuah buku untuk diterbitkan. Gagasan ini kemudian disambut baik oleh teman-teman peserta mata kuliah dan bersedia menyampaikan tulisan masing-masing kepada saya dan hari ini berbentuk sebuah bukua yang berada di tangan para pembaca sekalian. Untuk itu kepada rekan-rekan seperjuangan, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga atas apresiasi dan dukungannya dalam penerbitan buku ini.

Pada kesempatan ini pula saya haturkan terima kasih dan penghargaan kepada ibu Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik FISP Universitas Indonesia yang telah bersedia memberi kata pengantar dan berbagai kontribusi pemikiran kepada penyunting kearah penerbitan buku ini. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada dosen pembina mata kuliah ini, yakni Prof. Dr. Amir Santoso, MA dan ibu Dr. Isbodroni Suyanto, MA yang telah memberi bobot terhadap makalah saat didiskusikan.. Kepada seluaruh staf dan kariayawan pada sekretariat Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih dan penghargaan pula saya sampaikan kepada Rektor Universitan Muhammadiyah Maluku Utara, yang telah bersedia memberi sambutan dan dukungannya terhadap penerbitan buku ini. Kepada Penerbit UMMU Press, atas kesediaan menerbitkan buku ini saya haturkan terima kasih

Buku ini tidak akan rampung tanpa motivasi rekan-rekan dari Rawasari Community Institute (RCI) terutama bapak Herman Usman sebagai direktur, Abdurrahim Thalib, Abd. Chalil Hi. Ibrahim Tjan, Supriyanto Prasaga, Muhammad Nur, Sahrin, Sukri, dan Yusup, terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Saiful Ahmad Laring dan Agusmawanda Djafar atas saran dan pandanganya. Kepada Istri tercinta Hamida A. Jasin serta anak-anakku tersayang Lisdasari, M. Afan Daffa dan Nurjanah semoga buku ini menjadi pelajaran berharga bagi mereka semua.

Akhirnya saya mohon maaf atas ketidaksempurnaan buku ini, kritik dan saran guna perbaikan sangat dinantikan untuk menjadi bahan pertimbangan revisi pada penerbitan berikutnya. Harapan saya semoga buku ini memberi manfaat terhadap pembangunan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia saat ini dan masa depan.

Penyunting

Muhlis Hafel

## DAFTAR ISI

Pengantarr. Valina Singka Subekti, M.Si.....	
Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara .....	
Ucapan Terima Kasih.....	
Pendahuluan : Sekilas Dinamika Enam Kekuatan Politik di Indonesia.....	

### **BAGIAN : PERTAMA**

#### **POLITIK KEPARTAIAN**

Partai Personal, Imagologi dan Multipartisme dalam Dinamika Kepartaian di Indonesia Pasca Orde Baru.....	
--	--

*Daniel Hutagalung*

Ambiguitas Partai Politik Agama dalam Demokrasi.....	
--	--

*A Bakir Ihsan*

Pengaruh Institusionalisasi Partai Politik Terhadap Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia Era Reformasi.....	
---	--

*Titin Purwaningsih*

Dinamika Kepartaian di Indonesia.....	
---------------------------------------	--

*Nur Hasanah, AS*

### **BAGIAN : KEDUA**

#### **POLITISASI BIROKRASI**

Birokrasi di Indonesia dalam Rekonstruksi Budaya Patron-Klien.....	
--	--

*Andi Tendri Sompa*

Birokrasi di Indonesia.....	
-----------------------------	--

*E. Winarto*

Negara Birokratik Otoriter Era Orde Baru.....	
---	--

*Toto Pribadi*



Profesionalitas Birokrasi Dalam Pemerintahan Indonesia Pasca Orde Baru...

*Indra Jaya*

## **BAGIAN : KETIGA**

### **MILITER DAN POLITIK**

Militer di Indonesia: Pra-Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi,.....

*Fayakun Andriardi*

MILITER DI INDONESIA : Karakteristik, Peran dan Perubahannya Sel Orde Lama, Orde Baru dan Masa Reformasi

*Jerry Sambuaga*

Sipil Militer Dalam Kekuatan Politik dan Demokratisasi di Indonesia.....

*Muslim Mufti*

Reformasi TNI dan Demokratisasi di Indonesia.....

*Romanus Ndau*

## **BAGIAN : KEEMPAT**

### **POLITIK PERBURUHAN**

Neoliberalisasi Kebijakan Perburuhan di Indonesia Pasca Orde Baru.....

*Muhlis Hafel*

Gerakan Buruh dan Demokratisasi di Indonesia (Masa Orde Baru).....

*Fadjari Iriani Sophiaan*

Buruh di Indonesia.....

*Joko Putro Purnomo*

## **BAGIAN : KELIMA**

### **DINAMIKA CIVIL SOCIETY**

Ruang Politik Hubungan Aktivisme Civil Society Dalam Mengembangkan Tata Pemerintahan Demokratis.....

*Neneng Yani Yuningsih*

Dua Model Civil Society di Indonesia.....

*Zulfikar Gazali*

Revitalisasi Masyarakat Sipil Berdasarkan Pembentukan, Fungsi Secara Politik dan Ekonomi Terhadap Negara.....  
*Andisi Yudiarsa*

**BAGIAN : KEENAM**

**ISLAM POLITIK**

Peta Politik dan Gerakan Islam di Indonesia (Perspektif dan Tantangan Politik Islam ke Depan).....

*Andi Zastrawati*

NU Sebagai Kekuatan Politik : Relasi Kuasa Pasca Khittah Sampai Muktamar Cipasung.....

*Ma'mum Murod Al-Barbasy*

Respon Islam Politik terhadap Pemikiran Islam Liberal Indonesia Kasus Terbentuknya Partai Keadilan Sejahtera.....

*Teuku Taufiqulhadi*

Gerakan Laskar Jihad Dalam Dinamika Politik Indonesia Pasca Orde Baru.....

*Muhlis Hafel*

**PARA PENULIS**

**sDAFTAR INDEX**

---

# NEOLIBERALISASI KEBIJAKAN PERBURUHAN DI INDONESIA PASCA ORDE BARU

*Muhlis Hafel*

## **Pendahuluan**

Membicarakan masalah perburuhan di Indonesia pasca Orde Baru, memang sangat kompleks dan rumit untuk menemukan titik cerahnya. Kompleksitas dan kerumitan tersebut diakibatkan oleh kebijakan perburuhan yang selalu berpihak kepada pemilik modal, baik dalam maupun luar negeri. *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* adalah dua lembaga donor internasional yang paling kanibal dan sangat berpotensi ikut meluluh lantakan nasib buruh di Indonesia. Negara berada pada posisi tertekan oleh kedua lembaga Internasional itu, terutama tuntutan IMF dengan *Letter of Intent-nya*, yang menginginkan adanya pasar kerja fleksibel, yang dicapai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan *outsourcing*.

Kajian ini lebih cenderung menguraikan konsep kebijakan perburuhan di Indonesia pasca Orde Baru yang tercekoki oleh watak neoliberalisme, terutama keterkaitannya dengan kelahiran Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Watak Neoliberal telah menabur pasar bebas, ekspansi modal dan globalisasi terhadap kebijakan perburuhan di Indonesia pasca Orde Baru, sehingga pada gilirannya menuai kebebasan yang memporak-porandakan bangunan perburuhan yang hendak ditata sejak dulu kala.

Tulisan ini juga berupaya menjelaskan posisi buruh sebagai kelompok manusia yang dikanihali atau dieksploitasi oleh pemilik modal dan pemerintah. Sesungguhnya buruh merupakan pahlawan *devisa* negara tapi diberlakukan semena-mena oleh pengusaha atau pemilik modal dan negara. Teriakan dan rintihan kaum buruh bagaikan anjing menggonggong kafila tetap berlalu, nasib buruh semakin memprihatinkan bahkan dikhawatikan kedepan nanti generasi keturunan kaum buruh akan ikut mengancam Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini disebabkan oleh pendapatan buruh yang diukur melalui Upah Minimum Propinsi (UMP), atau diukur sesuka-suka hati pemilik modal. Predikat buruh sebagai kekuatan politik, hampir tidak terasa dalam konstalasi kepolitikan di Indonesia pasca Orde Baru ini, bila dibandingkan dengan Militer, Birokrasi, Partai Politik, Civil Society, Islam dan Media Massa.

## **Dampak Neolib dalam Kebijakan Perburuhan**

Neoliberalisme merupakan sebuah fenomena sosial-politik yang biasanya dialamatkan kepada sekelompok penguasa dan intelektual di Barat yang mendukung dan ingin menghidupkan kembali gagasan-gagasan liberalisme klasik.<sup>xxiv</sup> Neoliberalisme adalah kata lain dari “liberalisme baru”. Neoliberalisme kerap dianggap sebagai pendukung pasar bebas, ekspansi modal dan globalisasi.<sup>xxiv</sup>

Istilah neoliberalisme sering disalah-artikan. Misalnya, ada sebagian yang menganggap bahwa ekonomi pasar identik dengan neoliberalisme. Menurut B. Herry Priyono, neoliberalisme memang melibatkan aplikasi ekonomi pasar, tetapi tidak semua ekonomi pasar bersifat neoliberal: ekonomi pasar sosial tidak bersifat neoliberal. Awalan *neo* (baru) pada istilah neoliberalisme menunjuk pada gejala yang mirip dengan tata ekonomi 30 tahun terakhir dengan masa kejayaan liberalisme ekonomi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20,

---

yang ditandai dominasi *financial capital* dalam proses ekonomi. Namun, yang terjadi dalam 30 tahun terakhir tersebut (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20) bercorak lebih ekstrem dan gejala ini berlangsung dengan berakhirnya era besar yang disebut *embedded liberalism*.<sup>xxiv</sup> Neoliberalisme berisi kecenderungan lepasnya kinerja pemodal dari kawalan, tetapi dalam bentuk yang lebih ekstrim. Neoliberalisme kadangkala dianggap sebagai cara para tuan besar pemodal untuk merebut kembali kekuasaan, sesudah mereka terkekang dalam periode setelah Perang Dunia II sampai dasawarsa 1970-an. Walaupun neoliberalisme selalu dikaitkan dengan ekonomi, namun sebenarnya neoliberalisme bukan hanya sekedar ekonomi. Neoliberalisme bervisi tentang manusia dan masyarakat dengan cara pikir ekonomi yang khas sebagai perangkat utama.<sup>xxiv</sup>

Neoliberalisme melahirkan berbagai dampak dalam pembangunan ekonomi, terutama pada sektor <sup>xxiv</sup>: (1) *Industri lokal akan mati*, Hambatan perdagangan dibuat dengan tujuan antara lain untuk melindungi industri dan tenaga buruh lokal. Nah, dengan ditiadakannya hambatan perdagangan, maka harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini mengakibatkan matinya industri dan buruh lokal perlahan-lahan. (2). *Buruh tidak mendapat perlindungan dari negara*, Dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur tangan dalam penentuan gaji para buruh; menurut kaum neoliberal, hal ini merupakan urusan antara pengusaha pemilik modal dan para buruh. Akibat dari kebijakan seperti ini adalah hak-hak buruh tidak lagi mendapatkan perlindungan dari negara. Pengaturan upah buruh, misalnya, sepenuhnya menjadi kewenangan pengusaha. Nah, masalahnya, apakah pengusaha tidak menindas para buruh bila kondisi ini terjadi (3). *Privatisasi aktivitas ekonomi*, Privatisasi atau denasionalisasi, swastanisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi atau dari milik negara menjadi milik swasta dapat diartikan bahwa aktivitas ekonomi harus dikelola oleh swasta. Secara teori, privatisasi aktivitas ekonomi, membantu terbentuknya pasar bebas (neoliberalisme), mengembangkan kompetisi kapitalis malah sebenarnya lebih penting adalah kompetisi, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga lebih kompetitif kepada publik termasuk buruh. Tetapi teori semacam ini, berakibat negatif, karena layanan publik diberikan ke sektor privat yang justru akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk. (4). *Konsumen tak terlindungi dari produk-produk yang tak layak dikonsumsi*. Contoh: produk-produk yang telah diubah secara genetika. Berpotensi terjadi pemalsuan produk. (5). *Bergesernya manajemen ekonomi*, Ekonomi berbasis persediaan menjadi berbasis permintaan dalam arti negara berkembang yang tadinya kaya akan sumber daya manusia, sekarang malah menjadi tidak menikmati sumber daya manusia tersebut karena telah “dirampas dan dikuasai” oleh pemilik modal, ujung-ujungnya negara berkembang menjadi negara pengemis atas hasil tanahnya sendiri. Perekonomian dengan inflasi dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah; karena bagi neoliberalisme, penganggur adalah orang-orang yang kalah dalam persaingan, dan buruh berada pada level kalah bersaing itu.<sup>xxiv</sup> (6). *Masalah ekonomi adalah soal “komoditi”* Kaum neoliberalisme melihat bahwa seluruh kehidupan adalah sumber laba korporasi perusahaan. Contoh: air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Jadi, dimensi sosial dalam sumberdaya *public goods* direduksi hanya sebatas sebagai komoditas semata. (7). *Semua pemikiran di luar rel pasar dianggap salah*. Salah satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, sehingga pada titik tertentu tidak lagi mempunyai makna selain apa yang dilakukan oleh pasar dan pengusaha. Bagi kaum neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai dan hanya satu cara yang rasional untuk mengukur nilai yakni pasar. Selain itu, wilayah politik dianggap sebagai tempat pasar berkuasa dan

---

konsep globalisasi dijadikan cara untuk perluasan pasar melalui WTO, sehingga neoliberalisme yang “kapitalisme” dianggap sebagai neo-imperialisme. (8). *Semakin lebar jurang antara si kaya dan si miskin*. Jelas akan terjadi kesenjangan yang tidak terbantahkan, antara pemilik modal dan buruh, kesenjangan menciptakan patologi sosial dalam hubungan kemanusiaan.<sup>xxiv</sup>

### **Perubahan Karakter Kebijakan Perburuhan Pasca Orde Baru**

Keruntuhan Orde Baru otomatis memberi peluang kemunculan era baru yang oleh kita saat ini dikenal dengan Orde Reformasi atau Era Reformasi. Ambruknya bangunan Orde Baru yang ditandai dengan longsohnya kekuasaan presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, kebijakan perburuhanpun ikut mengalami perubahan. Era reformasi yang bernuansa demokratisasi dan liberalisasi politik, ikut merubah tatanan dan karakter perburuhan Indonesia dalam sektor serikat buruh dan hubungan kerja. Sebagai pertanada perubahan paradigma, perburuhan dimaksud dengan kemunculan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, Tentang Serikat Buruh dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pemberlakuan Undang-Undang No. 21 tahun 2000, dengan serta merta merombak sistem serikat buruh yang selama ini digunakan di Indonesia yakni dari bentuk *Single Union Sistem* menjadi *Multi Union Sistem* yang oleh kalangan intelektual menilai perubahan tersebut merupakan desakan kuat dari lembaga donor Internasional seperti IMF dan World Bank dengan alasan memberi kebebasan kepada sang buruh untuk berekspresi. Sedangkan dalam sektor hubungan kerja, muncul pula Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang benar-benar menunjukkan taring neoliberalisme yang amat panjang dan tajam.

Fleksibelitas undang-undang tersebut dapat merombak secara mendasar ketentuan undang-undang sebelumnya yang ditandai dengan diberlakukannya ketentuan sebagai berikut : (1). Berlakunya sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, perusahaan dapat mempekerjakan buruh kontrak untuk pekerjaan-pekerjaan jenis tertentu dalam waktu tertentu. Namun ketentuan tersebut berakibat pada banyaknya perusahaan yang mengambil langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada buruh tetap untuk kemudian direkrut kembali dengan menggunakan ketentuan yang berlaku pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).<sup>xxiv</sup> Fenomena yang menjadi catatan kita disini adalah bahwa buruh kontrak tidak memperoleh haknya sebagaimana ketika dia menjadi buruh tetap pada perusahaan itu, dengan demikian ada praktek ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan ketenagakerjaan. Pengusaha lebih diuntungkan dengan tidak perlu mengeluarkan biaya besar guna membayar pesangon pada saat PHK, karena buruh kontrak tidak masuk dalam kasifikasi buruh tetap. Bagi penulis, pada kondisi seperti ini pengusaha berlaku kanibal terhadap buruh yang memang bernar-benar tidak berdaya. (2). Berlakunya sistem *outsourcing*. Dalam sistem ini, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian perborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.<sup>xxiv</sup>

Dampak dari implementasi sistem *outsourcing* dalam ketentuan undang –undang tersebut adalah banyak perusahaan memutuskan hubungan kerjan dengan buruhnya untuk selanjutnya direkrut kembali melalui perusahaan jasa kerja (*outsourcing* pekerja). Kondisi ini dimaksudkan oleh penguasa sebagai upaya efisiensi dan merasa aman jika buruh yang di *outsource* adalah buruh perusahaan jasa pekerja. Dengan demikian yang bertanggung jawab terhadap buruh *outsource* adalah perusahaan jasa pekerja.<sup>xxiv</sup> Muncul kemudian Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dianggap tidak selalu memiliki karakter neoliberalisme, namun undang-undang tersebut

---

masih memberi peluang bagi pemerintah untuk ikut serta dalam proses penyelesaian konflik industrial dalam negara.

Memang harus diakui bahwa karakter kebijakan perburuhan di Indonesia tidak bisa dilepaspisahkan dengan persoalan hubungan industrial. Dalam hal ini hubungan antara para aktor dalam proses produksi. Bahwa untuk menilai bagaimana karakter kebijakan perburuhan harus melihat pula bagaimana hubungan industrial yang berlangsung. Dalam konteks ini terdapat tiga (3) dimensi yang berlangsung dalam hubungan industrial dan merupakan dasar penentu karakter kebijakan perburuhan, yakni berkaitan dengan pasar kerja, peran negara dalam menentukan upah kerja dan kondisi kerja, dimensi kebebasan serikat buruh dan dimensi konflik industrial serta bagaimana cara penyelesaiannya.

Ketiga dimensi tersebut adalah perspektif neoliberal sebagai perkembangan Liberalisme, perspektif Marxian dan perspektif Pancasila. Ketiga perspektif tersebut merupakan modifikasi dari apa yang dikemukakan oleh Salomon yang mengandung sistem hubungan industrial dalam perspektif Unitari, perspektif Pluralis dan perspektif Marxis.<sup>xxiv</sup> Perspektif Unitari dan Pluralis digabung kedalam perspektif Neoliberal dan dapat di tambahkan juga perspektif Pancasila karena mengingat yang terjadi adalah hubungan industrial di Indonesia. *(Pertama)*, *Dimensi Hubungan Kerja*, Yang dimaksudkan dengan hubungan kerja di sini terkait dengan masalah penentuan upah dan kondisi kerja adalah merupakan suatu dimensi dari hubungan industrial. Hubungan kerja terkait dengan pertemuan antara pihak buruh (*demand*) dengan pihak pemberi kerja (*supply*), dalam hubungan kerja terdapat pihak pemerintah yang memastikan bahwa hubungan kontraktual perkerjaan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah juga berkepentingan untuk memperhatikan agregat tingkat penawaran dan permintaan tenaga kerja untuk memaksimalkan tenaga kerja baru guna mengurangi pengangguran. Oleh karena itu pemerintah berpeluang melakukan intervensi terkait dengan tingkat upah kerja buruh dengan asumsi menurunkan upah kerja, untuk kepentingan penyerapan tenaga kerja baru yang berupa pengangguran. Dengan diturunkannya tingkat upah, hasil pengurangan upah dimaksud dapat digunakan untuk membayar upah dari pekerja baru tersebut. Posisi inilah akan terjadi jalinan hubungan antara buruh, pengusaha atau pemilik modal dan pemerintah.<sup>xxiv</sup>

Namun oleh Keynes berpandangan bahwa bagaimana aktifitas ekonomi dan pekerjaan dapat ditentukan oleh jumlah total permintaan atau agregat permintaan dan ekonomi. Keynes berpendapat, jika tingkat upah diturunkan maka akan mengurangi kekuatan ekonomi secara keseluruhan dan agregat permintaan dalam masyarakat. Jika orang memiliki uang lebih sedikit untuk dibelanjakan maka perusahaan akan memproduksi barang lebih sedikit, dengan demikian maka pengangguran tetap akan berlanjut secara terus menerus. Asumsi sentral Keynes adalah dengan adanya pengangguran, upah tidak akan jatuh secukupnya untuk mengeliminasi pengangguran. Karena itu ekonomi akan menusuk dirinya sendiri, bahwa dalam keseimbangan terjadi pengangguran yang tinggi dimana kasus tersebut mungkin menjadi argumen terhadap kebijakan intervensi pemerintah untuk menguranginya.<sup>xxiv</sup>

Dalam perspektif filosofis, minimal ada tiga persoalan neoliberal yang dapat dijustifikasi, yakni (1), Neoliberalisme memandang bahwa ekonomi adalah kunci untuk memahami dan mendeteksi berbagai fenomena. Konsep ini berpandangan pada dasarnya manusia merupakan makhluk ekonomi (*homo economicus*) karenanya semua bentuk hubungan antara sesama manusia selalu bertolak ukur ekonomi.(2). Pergeseran arena hidup sosial menjadi urusan individu. Dengan pandangan bahwa manusia makhluk yang berusaha (*entrepreneurs*), yang merupakan konsep modal manusia (*human capital*). (3). Pemandangan regulasi dari ranah sosial ke ranah individu. Dalam gagasan ini menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kerumunan para *entrepreneus* yang otonom seperti buruh, menejer, guru, petani dan lain-lain, sehingga masalah pengangguran, kemiskinan dan sejenisnya bukan lagi menjadi tanggung

---

jawab negara tapi tanggung jawab pribadi.<sup>xxiv</sup> (*Kedua*), *Dimensi Serikat Buruh*, Perspektif pluralis yang neoliberal memberi peluang besar kepada perserikatan buruh dan organisasi formal guna mengekspresikan kepentingan mereka dan dapat mempengaruhi keputusan manajemen agar memenuhi tujuan mereka. Dalam pandangan Fox, bahwa legitimasi perlu diciptakan, tidak hanya pada kekuatan industrial atau permainan manajemen, namun juga pada nilai sosial yang mengakui hak kelompok kepentingan dan tujuan mereka sendiri.<sup>xxiv</sup> Sedangkan dalam perspektif Marxian, Marx memandang hubungan buruh dan hubungan industrial dipandang sebagai serangkaian aktifitas politik yang berkaitan dengan pengembangan kelas pekerja. Mereka merupakan bagian dari seluruh proses dalam mencapai perubahan fundamental dalam sistem sosial dan politik tersebut. Sementara itu pandangan Pancasila, memandang dalam hubungan industrial Pancasila, pertumbuhan serikat buruh yang terlalu kuat dianggap sesuatu yang negatif. Pandangan ini menganggap buruh akan cenderung konfrontatif terhadap pemilik modal bila pertumbuhan serikat buruhnya semakin kuat. Bisa jadi bentuk hubungan industrial Pancasila merupakan, upaya untuk mengatasi kekhawatiran masa lalu, seperti aksi-aksi konfrontasi serikat buruh pada tahun 1960-an, terutama serikat buruh yang berafiliasi di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan demikian sebenarnya serikat buruh harus tumbuh secara profesional sehingga dalam perjalanannya tidak menimbulkan konflik-konflik yang berpotensi negatif.

Sedangkan pada masa Orde Baru diterapkan kontrol ketat diikuti dengan represi negara terhadap buruh. Gerakan serikat buruh dipolitisasi seiring dengan konteks strategi Orde Baru. Depolitisasi dilakukan dengan memperkenalkan konsep Hubungan Industrial Pancasila (HPP), pada tahun 1974. Asas ini mengandung tiga prinsip dalam hubungan perburuhan yakni (1), *Prinsip Rumongso Handarbeni* yaitu merasa ikut memiliki mitra dalam produksi dan mitra dalam pembagian keuntungan. (2), *Prinsip Melu Hangrungkebi*, yaitu ikut mempertahankan dan memajukan perusahaan, dan (3), *Prinsip Mulat Sariro Hangroso Weni* yaitu keberanian untuk mawas diri. Konsep HPP ini kemudia salah satunya diterjemahkan dalam bentuk serikat buruh. Pengontrolan serikat buruh dilakukan dengan disatukannya seluruh gerakan buruh kedalam satu wadah Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) pada tahun 1973. Hal ini mengakibatkan pertanggungjawaban federasi mengarah kepada pemberi dana dan kemudian menempatkan pemerintah sebagai sumber legitimasi untuk melakukan kontrol terhadap gerakan organisasi buruh. Di samping itu pula gerakan buruh pada tingkat unit kerja semakin lemah sehingga kontrol terhadap kondisi kerja pengupahan dan hak-hak buruh yang diabaikan oleh pengusaha semakin berkurang. Mengapa demikian? Jawabannya karena Orde Baru lahir sebagai refleksi dari kemenangan Angkatan Darat ketika melawan PKI, karenanya Orde Baru selalu berupaya mencegah kehadiran kembali elemen-elemen gerakan buruh yang dianggap radikal, karena buruh selalu diasosiasikan sebagai kelompok radikal yang paling dekat dengan PKI dan paling berpotensi melawan pemerintah. Oleh sebab itu FBSI sendiri merupakan bentukan pemerintah yang benar-benar tidak mandiri karena selalu berada dalam posisi subordinat.<sup>xxiv</sup>

### **Intervensi Lembaga Donor Internasional**

Kebijakan perburuhan era reformasi tidak terlepas dari pengaruh krisis ekonomi dan politik dunia yang ikut melanda Indonesia ketika itu. Pembentukan dua undang-undang yakni UU No. 21 tahun 2000 maupun UU No. 13 tahun 2003 juga tidak terlepas dari pengaruh krisis tersebut. Ketika Indonesia mengalami krisis keuangan yang kemudian merambah masuk samapai pada tingkat krisis perbankan dan krisis sosial dan politik, tentu sangat menyetuh ke seluruh sendi-sendi kehidupan. Merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam sebagai akibat dari serangan yang sangat dahsyat terhadap dolar oleh ulah

---

spekulan yang jatuh temponya utang swasta dalam jumlah yang cukup tinggi. Terpuruknya kepercayaan ke titik nol menjadikan rupiah yang ditutup pada level Rp. 4.850/dolar Amerika Serikat pada tahun 1997. Bahkan meluncur lebih cepat ke level sekitar Rp. 17.00/dolar AS pada Januari 1999.<sup>xxiv</sup> Sementara itu tuntutan demokrasi dan demokratisasi pun diteriakan oleh berbagai LSM dan Serikat Buruh dengan mendesak agar segera dilakukan perubahan undang-undang yang dinilai represif. Isu kebebasan serikat buruh juga ikut diperjuangkan dengan alasan memperkuat hak-hak sipil. PHBI dan YLBHI mendesak pemerintah untuk meratifikasi konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi di Indonesia.

Disamping desakan dan tekana aktor-aktor dalam negeri, juga tuntutan demokrasi dan demokratisasi politik yang datang dari luar negeri, terutama dari lembaga-lembaga internasional yakni *International Monetary Fund (IMF)*, *International Labor Organisation (ILO)* dan *World Bank (WB)*. Campur tangan lembaga donor internasional ini (IMF) di Indonesia terbukti dengan adanya aliran dana pinjaman dari IMF ke Indonesia guna menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pinjaman IMF ini digunakan untuk mendukung neraca pembayaran yang langsung ke Bank Indonesia, sedangkan pinjaman ke negara Jepang dan Bank Dunia dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat spesifik. Perbaikan kondisi ekonomi makro yang berdampak pada kepercayaan pasar atau investor. Dukungan IMF bagi Indonesia dalam memperoleh persetujuan penjadwalan utang dalam Paris Club. Selama ini tidak ada negara yang pernah mengajukan penjadwalan utang tanpa didukung oleh IMF.<sup>xxiv</sup>

Karena kekuatan *repress*-nya amat kuat, IMF dengan ILO berdasarkan fasilitas *Letter of Intent (LoI)* mendesak Indonesia agar lebih konsen kepada persoalan penegakan Hak Asasi Manusia serta memperluas spektrum demokratisasi sebagai persyaratan untuk pencairan bantuan pinjaman. Ketentuan ini kemudian membuka peluang bagi ILO untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan masalah perburuhan yang lebih demokratis. Lembaga ini (ILO) sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan perburuhan harus benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi ILO. Sebagai upaya melakukan pengewasan kepada Indonesia, ILO menggunakan perjanjian kerja sama dengan IMF dengan Indonesia sebagai *stick and carrot* pemerintah, bahwa jika pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan kebijakan perburuhan sesuai dengan konvensi ILO maka bantuan IMF akan ditunda malah dapat dihentikan bantuan dimaksud, begitu juga *World Bank* bahkan akan dialihkan ke negara lain. Implementasi dari komitmen ini adalah penandatanganan Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi pada bulan Juni 1998. Dengan demikian, berselang waktu satu tahun Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang meratifikasi semua konvensi *International Labor Organisation (ILO)*.<sup>xxiv</sup>

Dengan penandatanganan itulah kemudian menjadi dasar terhadap neoliberalisasi serikat buruh yang mengalami represi dan pembatasan pada jaman Orde Baru. Tekanan kuat dari lembaga-lembaga internasional inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh. Hal ini menjadi bukti bahwa disamping tekanan nasional juga tekanan internasional yang amat dahsyat dengan tema-tema demokrasi dan kebebasan. Tekana internasional seperti ini yang kemudian menjadikan pemerintah tidak memiliki pilihan lain kecuali meneoliberalisasi serikat buruh di Indonesia. Dengan demikian, proses pembentukan UU No. 21 tahun 2000 lebih sesuai dengan tuntutan nilai demokrasi dibanding dengan proses pembentukan UU No. 13 tahun 2003. Undang-Undang No. 12 tahun 2000 yang meliberalisasikan serikat buruh pada dasarnya merupakan dimensi perburuhan yang tidak terlalu bertentangan dengan kepentingan pemerintah yang fokus pada pemulihan perekonomian pasca krisis, ditambah dengan kuatnya desakan demokratisasi di segala bidang,



---

baik oleh aktor-aktor domestik amupun lembaga internasional, dan pemerintah tidak memiliki pilihan lain terkecuali harus mengakomodir segala tuntutan dimaksud dengan melibatkan berbagai elemen dan stakeholders dalam masyarakat.

### **Kesimpulan**

Buruh sebagai golongan sosial yang mempunyai potensi untuk berperan melakukan perubahan ekonomi, sosial dan politik, tidak bisa dipandang remeh dalam dinamika perjalanan masyarakat dan bangsa. Meskipun posisinya sebagai golongan masyarakat terbawah, dalam stratifikasi sosial masyarakat kapitalis, namun buruh juga melahirkan generasi bangsa kedepan. Dalam tataran ekonomi dan politik, buruh merupakan kelompok masyarakat yang dapat memberikan manfaat besar terhadap perekonomian bangsa karena sebagai pahlawan income, maupun dalam kepolitikan negara.

Sebagaimana telah diuraikan pada awal tulisan ini, bahwa buruh di Indonesia pada era reformasi ini hampir tidak memiliki bergening politik dalam konstalasi kepolitikan negara. Hal ini disebabkan karena organisasi buruh di Indonesia, terfragmentasi kedalam sub-sub organisasinya sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai buah dari keinginan lembaga internasional seperti IMF, WB dan ILO yang neoliberal itu.

Tiupan angin neoliberalisme yang amat kuat melalui lembaga donor internasional itu, kemudian ikut melahirkan kebijakan dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dianggap tidak membawa dampak yang signifikan terhadap buruh sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia. Buruh yang selayaknya menjadi sebuah kekuatan politik besar tapi ternyata tidak memiliki gigi sama sekali. Di era reformasi ini pernah didirikan Partai Buruh tapi justru partai tersebut tidak bergening di kalangannya sendiri. Tidak sebagaimana negara lain, seperti yang terjadi di Negara Australia, yaitu kemenangan Kevin Rudd dari partai buruh untuk menjadi Perdana Menteri. Hal tersebut makin membuktikan bahwa buruh sebenarnya memegang peranan penting dalam konstalasi kepolitikan dalam negara dimana buruh itu berdomisili.

Di Indonesia, buruh seringkali juga dimanfaatkan sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang tertentu seperti pemilik modal bahkan oleh pemerintahnya sendiri. Bahkan justru buruh hanya menjadi kebutuhan sementara bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dan meninggalkannya ketika mereka sudah masuk pada lingkaran kekuasaan.

Hubungan antara buruh dengan pemilik modal idealnya adalah saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Disisi buruh, semestinya sudah mendapatkan apa seharusnya menjadi hak-haknya. Tidak hanya upah yang memberi kesejahteraan terhadap kehidupan buruh itu sendiri. Namun juga hal-hal lain yang sekiranya dapat menunjang kesejahteraan buruh tersebut. Namun dalam tataran undang-undang sendiri dapat menghambat kesejahtraannya, termasuk pasal-pasal yang berbuntut pada pengaturan tentang buruh kontrak dan *outsourcing* sebagai penagaruh dari neoliberal. Oleh karenanya, kebijakan yang dipengaruhi oleh watak neoliberalisme seperti ini jelas merugikan bahkan memperlemah posisi tawar buruh pada ranah ekonomi dan kepolitiknya dalam negara.

### **PUSTAKA RUJUKAN**

Archer, Robin. *Economic Democracy*, Oxford Clarendon Press 1995.

Beardshaw, John. *Economics : A Student Guide*, London, Pitman Publishing, 1992.

---

Bellante, Don dan Jackson, Mark. *Labor Economics : Chois in Labor Markets*, (Terjemahan), Jakarta Universitas Indonesia. 1990.

Bourdieu, Pierre. *The Esence of Neoliberalism: La mande Diplomatique*, Desember 1988.

Batubara, Cosmas. *Hubungan Industrial*, Buana Priting, Jakarta, 2008.

Clarce, Simon. *The Neoliberalism Theory of Society*, London Pluto, 2005.

Habibi, Muhtar. *Gemuruh Buruh : Di Tengah Pusaran Neoliberalisme: Pengadopsian Kebijakan*

*Perburuhan Neoliberal pasca Orde Baru*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2009.

Haryani, Sri. *Hubungan Industrial di Indonesia*, AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.

Kartonegoro, Sentanoe. *Hubungan Industrial: Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit)*, Jakarta, yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1999.

Monapa, Arun. *Industrial Relations*, New Delhi. McGraq Hill Publishing Company. 1985.

Paradis, A. Adrian. *Labor in Action, The Story of The American Labor Movement The New America Library*, Inc, New York, 1966. (Terjemahan),

Salomon, Michael. *Industrial Relation : Theory and Practice*, New York, Prentice Hall, 1992.

Sapsfor David dan Tzanatos, Zafiris. *Curren Issue in Labour Economics*, Macmillan Education Ltd, London. 1190.

Susetiawan. *Konflik Sosial ; kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Pengusaha dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.

### **Jurnal**

IIslam, Iyanatul, *Employment, Labour Markets, and Economics Recovery in Indonesia : Issue*

*and Option*, Working Paper United Nation Support for Indonesia Recovery No. 00/04 September, 2000.

Sudiarto, *Menghadapi Neoliberalisme, Saatnya membangun Kekuatan Buruh*, Juli, 2001

Wiyono, Alosius. *Serikat Pekerja dan Peningkatan Hak-hak Asasi Serta Standar Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jurnal Studi Indonesia, Vol 10 No. 1,

Maret

---

2000.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang *Serikat Buruh*.

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*